

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program D3 Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

WAHIDI ROBI IHKSAN
NIM.01870611241



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : WAHIDI ROBI IHKSAN
NIM : 01870611241
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN

PEKANBARU, JULI 2021

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

Khairil Henry, SE, M.Si.Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 19990 3 001

KETUA PRODI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : WAHIDI ROBI IHKSAN
 NIM : 01870611241
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN
 TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

DISETUJUI OLEH :

PANITIA PENGUJI

Faiza Mukhlis, SE., M.Si., Ak.CA.
NIP. 19741108 200003 2 004

PENGUJI I

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.
NIP. 19791127 200801 2 010

PENGUJI II

Irien Violinda Anggriani, SE., M.Si.
NIP. 19751106 200710 2 003

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN.

Oleh:

WAHIDI ROBI IHKSAN

Penelitian ini penulis laksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten pelalawan yang berlangsung pada bulan Maret s/d Juni 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada saat pandemi Covid-19. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan Pemerintahan serta pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan. Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan metode pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara, observasi, dan analisis data. Data primer Penulis peroleh dari pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sudah cukup bagus karena dalam kegiatannya melibatkan berbagai bagian sehingga terjalin suatu kerjasama yang saling mengoreksi satu sama lainnya sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan yang tidak di inginkan yang mungkin terjadi.

Kata Kunci: “Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Covid-19”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr . wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah yang maha kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan”**. Shalawat dan salam tetap senantiasa penulis ucapkan buat Nabi Muhammad SAW yakni Nabi dan Rasul bagi umat islam yang memberikan pengajaran dengan ilmu pengetahuan yang berguna untuk dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Rasa terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Orang Tuaku tercinta dan tersayang Bapak Ediyanto dan Ibu Erniati terimakasih karena telah menjadi tulang belakang, cinta hati, dan motivasiku setiap hari sehingga penulis dapat bertahan dan bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan diakhirat, serta semoga penulis dapat menjadi kebanggan serta tetap menjadi anak yang berbakti.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Ibu Dr. Mahyarni. SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Ibu Sahwitri Triandani SE, M, Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
5. Ibu Irien Violinda Anggraini SE, M, Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Adminstrasi Perpajakan.
6. Bapak Dr. Khairil Henry. SE, M, Si, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama tiga tahun tahun perkuliahan.
8. Seluruh pegawai di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang telah membantu penulis dengan memberikan data untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman serta sahabat di jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwasanya Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan kesalahan. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi ladang amal dan mudah-mudahan Allah subhanaallahu wa ta'ala membalasnya dengan memberikan pahala yang setimpal. Penulis berharap Tugas

Akhir ini bisa memberikan manfaat terutama bagi penulis sendiri serta dapat dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

WAHIDI ROBI IHKSAN
NIM. 01870611241

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PELALAWAN	
A. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.....	8
B. Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.....	10
C. Struktur Organisasi.....	11
D. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	11
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori	13
1. Prosedur.....	13
2. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli.....	13
3. Sistem Pemungutan Pajak	14
4. Fungsi Pajak	15
5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	16
6. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan	18
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	19
9. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan	19
10. Pengertian Pajak Menurut Islam.....	20
B. Tinjauan Praktek.....	21
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 di Kantor BPKAD Kabupaten Pelalawan	21
2. Proses Pelaporan Oleh Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 Di Kantor BPKAD Kabupaten Pelalawan.....	24
3. Proses Pembayaran Oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Selama Pandemi Covid-19 Dikantor BPKAD Kabupaten Pelalawan.....	26
4. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kantor BPKAD Kabupaten Pelalawan.....	27
5. Kebijakan Pemerintah Yang Dapat Mendorong Wajib Pajak Untuk Membayar Pajaknya	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2020	3
Tabel III.1	Target Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 – 2020.....	22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pelalawan	11
Gambar III.1	Pelaporan Oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalalawan	25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang di terima negara yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dana pajak hampir di alokasikan ke setiap sektor, salah satu sektor yang dialokasikan menggunakan dana pajak adalah dana insentif yang diberikan kepada setiap daerah. Dana tersebut yang akan digunakan oleh setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing. Menurut (Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya dikelola 100% (seratus persen) oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pedesaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang merupakan awalnya pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut masuk ke kas daerah setempat, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun salah satu Retribusi Pajak Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pungutan atas Pajak Bumi Dan Bangunan diatur dalam (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan) tentang perubahan atas (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan). Kemudian semenjak berlakunya (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah), maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Virus corona yang melanda Indonesia bahkan dunia menyebabkan pendapatan Indonesia dibidang Perpajakan menurun. Pada tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp1.190,22 triliun, dan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2020 yaitu senilai Rp1.034.,14 triliun. Oleh karena itu penulis memfokuskan pengamatan kepada “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan”.

Tabel I.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2020

Tahun	Penerimaan Perpajakan
2019	1.190,22 triliun
2020	1.034.,14 triliun

Sumber : Kementerian keuangan (Kemenkeu 2020)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi Covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan?
2. Adakah kemudahan proses pelaporan oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi Covid-19 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Pelalawan)?
3. Adakah kemudahan proses pembayaran oleh wajib Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi Covid-19 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten pelalawan.
2. Untuk mengetahui apakah ada proses kemudahan pelaporan yang diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk mengetahui apakah ada proses kemudahan Pembayaran yang diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu kesempatan untuk berlatih menerapkan ilmu yang diperoleh ketika berada di bangku kuliah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga penulis mendapat tambahan ilmu pengetahuan di dunia kerja yang sesungguhnya, dan pengalaman tersebut dapat berguna bagi penulis di masa yang akan datang.

2. Bagi Akademika

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah bahan bacaan sesuai dengan disiplin keilmuan yang ada berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sederhana dalam mengambil kebijakan yang tepat sehubungan dengan upaya peningkatan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tugas Akhir ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Harun, Hasyim, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau 28654.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang diperoleh secara langsung yang menjadi data primer didalam penelitian ini adalah pencapaian pajak daerah di sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data secara sekunder dari buku, literatur, jurnal, peraturan perundang – undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Interview (Wawancara), yaitu dengan mengemukakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Analisis Data, yaitu metode dalam memproses data menjadi sebuah informasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini penulis susun kedalam empat bab yang di masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi yang menjelaskan tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi, serta struktur organisasi instansi tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini Menjelaskan tentang pengertian Pajak menurut pajak secara umum, pengertian pajak menurut para ahli, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, pajak daerah,

pengertian pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan bangunan, objek pajak yang tidak dikenakan terhadap pajak bumi dan bangunan, subjek pajak bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan, pengertian epektifitas, pengertian pajak menurut islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil peneliti serta saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN

A. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwasanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewajiban meliputi:

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel:
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat dan
3. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dalam perjalanannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan merupakan Badan Daerah dengan type A melaksanakan fungsi



penunjang Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

B. Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

1. Visi

Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera)

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.
- b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
- c. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk Mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.
- d. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
- e. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
- f. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.
- g. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pencapaian misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

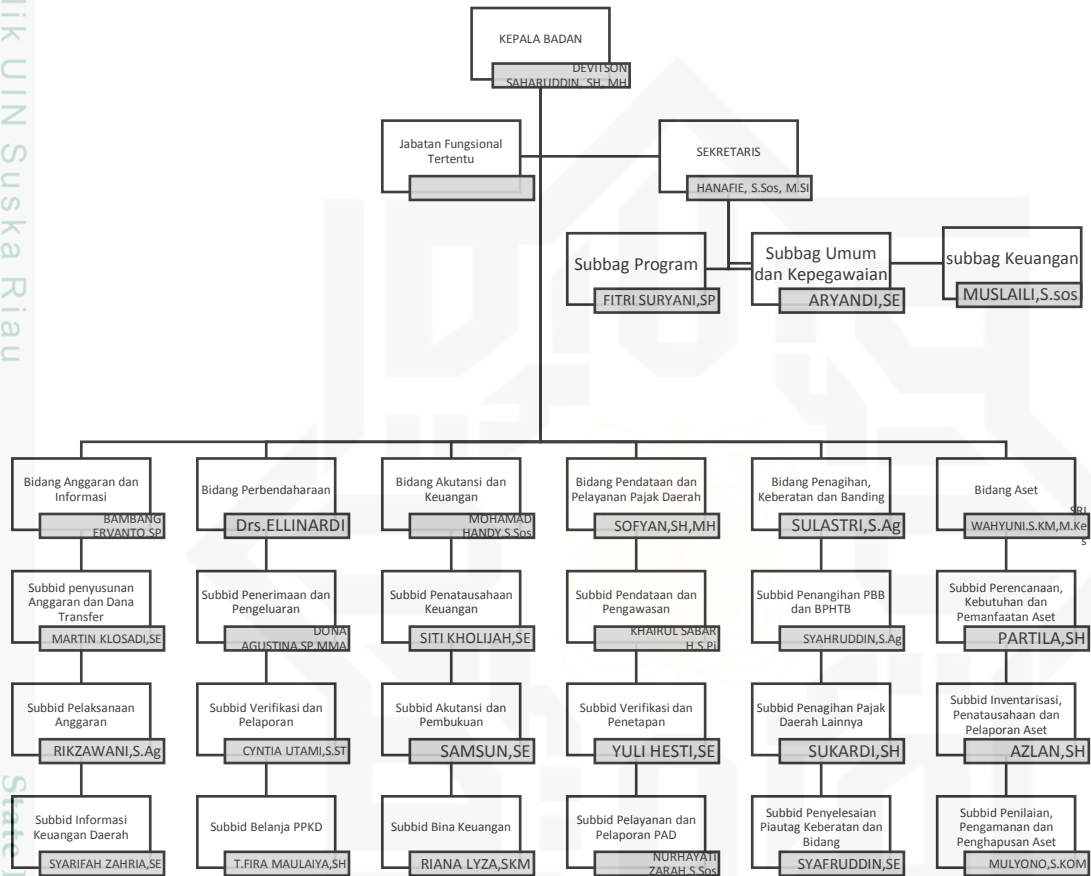
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi

Gambar II. 1
Struktur Organisasi
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Pelalawan



Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan (2021)

D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Bada Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang memuat program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penjabaran Program kerja operasional dalam bentuk kegiatan yang disusun secara tahunan dimuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD). Renja tersebut juga menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan serta saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pelalawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat masa pandemi Covid-19 dan pada saat sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019-2020. Rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan pada tahun 2019 pada saat sebelum pandemi Covid-19 yaitu Rp13.500.000.000 sedangkan realisasi pada tahun tersebut yaitu Rp15.752.468.430. Sedangkan target yang di tetapkan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 yaitu Rp16.050.000.000 dan realisasi penerimaan pada tahun 2020 juga melebihi target yang ditetapkan dengan nilai Rp17.950.125.791. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pembayaran pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan pada saat sebelum pandemi Covid-19 dan pada saat pandemi Covid-19 terjadi melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan bisa di katakan efektif di Kabupaten Pelalawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Didalam sistem pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan belum menerapkan sistem pelaporan secara online. Sistem pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) masih menggunakan sistem offline yang mana wajib pajak harus melaporkan pajaknya sendiri ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kabupaten Pelalawan. Selama pandemi Covid-19 belum adanya kemudahan proses pelaporan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Dapat disimpulkan bahwa adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan selama pandemi Covid-19. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan bisa dibayarkan secara online melalau Bank-Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan seperti Bank Mandiri atau Bank Riau Kepri.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat meningkatkan sistem kerjanya sehingga penerimaan pembayaran dari wajib pajak Bumi dan Bangunan dapat



diserap dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelalawan (APBDP) Kabupaten Pelalawan.

2. Adanya kreatifitas yang di berikan pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kedepannya. Pemerintah juga dapat bekerjasama tidak hanya dengan Bank yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan yang telah ditunjuk namun pemerintah juga dapat bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang jaringan retail Waralaba seperi Indomaret, Alfamart, BAZmart, dan lain sebagainya.
3. Adanya sistem atau aplikasi yang segera diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dapat memudahkan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaporan pajaknya yang mana wajib pajak tidak harus mendatangi kantor Badan pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lagi.
4. Adanya sistem apresiasi yang diberikan pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar pajak tepat waktu selama satu tahun. Apresiasi tersebut dapat diberikan melalui pemebrian hadiah atau dorprize.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia
- Ida Nuraida. 2014. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Jakarta: PT. Kanisius
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Padang: Akademia Permata.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: CV. Alfabeta
- Rifka R.N. 2017 *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Huta Publisher
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Non Buku

- Undang - Undang Pajak Bumi dan Bunganan nomor 12 tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang - Undang no 12 tahun 1994 perubahan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pemungutan pajak daerah.
- Undang - Undang pajak bumi dan bangunan pasal 3 mengenai objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.
- Undang - Undang pajak bumi dan bangunan pasal 4 mengenai subjek pajak bumi dan bangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1726/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 08 Maret 2021 M
 24 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

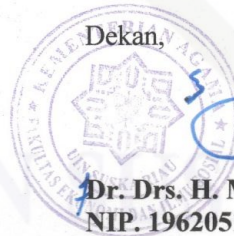
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Wahidi Robi Ihksan
 NIM. : 01870611241
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Bpkad Kabupaten Pelalawan Selama Pandemi Covid-19"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39809
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1726/2021 Tanggal 8 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

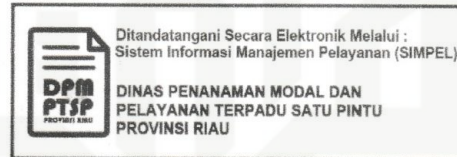
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WAHIDI ROBI IHKSAN |
| 2. NIM / KTP | : | 01870611241 |
| 3. Program Studi | : | PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIKANTOR BPKAD KABUPATEN PELALAWAN SELAMA PANDEMI COVID-19 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BPKAD KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-Cipta Diindungi Undang-undang

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Wahidi Robi Ihksan, Lahir di Desa Pulau Muda pada tanggal 08 Juli 2000. Anak satu-satunya didalam keluarga yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Ediyanto dan Ibu Erniati. Penulis memasuki pendidikan pertama di SD Negeri 004 Pulau Muda dari tahun (2006-2012), melanjutkan ke jenjang SMP Negeri 002 Teluk Meranti dari tahun (2012-2015), Melanjutkan ke jenjang SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci dari tahun (2015-2018). Kemudian pada tahun 2018 juga melanjutkan studi ke jurusan Administarsi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan lulus pada tanggal 13 Juli 2021. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul: **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PELALAWAN.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.